

Pencapaian indikator Kinerja utama diatas berpengaruh pada Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Merumuskan IPG yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Maka perempuan diharapkan menjadi bagian dari pembangunan masyarakat berbasis gender.

**IPG Kabupaten Pohuwato** menunjukkan lebih tinggi baik capaian Nasional maupun capaian Provinsi Gorontalo selama kurun waktu empat tahun, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8  
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Perbandingan IPG			
TAHUN	POHUWATO	PROVINSI GORONTALO	INDONESIA
2017	91,31	86,64	90,96
2018	91,11	86,63	90,99
2019	91,46	86,83	91,07
2020	91,36	86,73	91,06

Sumber : Data BPS

Grafik 2.3



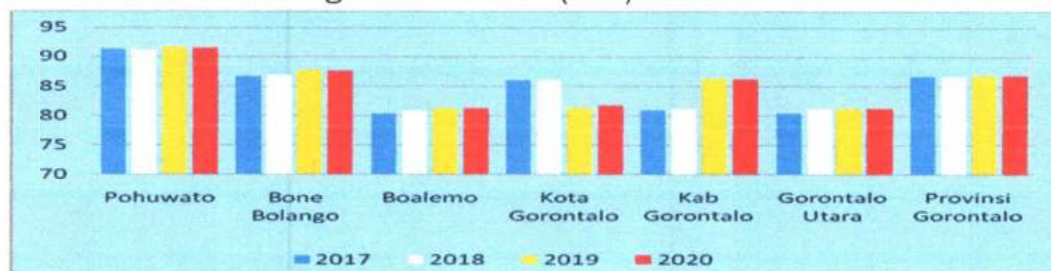
Paraf  
OPD Bag. Hukum

Selanjutnya dapat dilihat capaian IPG se-Provinsi Gorontalo menunjukkan Kabupaten Pohuwato memiliki IPG tertinggi selama kurun waktu empat tahun, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan di bandingkan capaian tahun 2019 sebesar 0,10 poin. Dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) se-Provinsi Gorontalo

IPG Se-Provinsi Gorontalo							
Tahun	Pohuwato	Bone Bolango	Boalemo	Kota Gorontalo	Kab Gorontalo	Gorontalo Utara	Provinsi Gorontalo
2017	91,31	86,71	80,36	86,09	80,98	80,44	86,64
2018	91,11	86,96	80,82	86,06	81,18	81,16	86,63
2019	91,46	87,71	81,14	81,33	86,25	81,25	86,83
2020	91,36	87,54	81,15	81,67	86,23	81,16	86,73

Grafik 2.4  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) se-Provinsi Gorontalo



Sumber : Data BPS

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG) indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja serta pengambilan keputusan. **IDG Kabupaten Pohuwato** menunjukkan masih di bawah capain Nasional, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



Tabel 2.10  
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Perbandingan IDG			
TAHUN	POHUWATO	PROVINSI GORONTALO	INDONESIA
2017	69,62	71,09	71,74
2018	72,26	71,23	72,10
2019	68,74	70,67	75,24
2020	73,16	70,74	75,57

Grafik 2.5  
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



Sumber : Data BPS

Dilihat capaian IDG se-Provinsi Gorontalo menunjukkan Kabupaten Pohuwato memiliki IDG tertinggi nomor 2 pada tahun 2020 Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11  
IDG se-Provinsi Gorontalo

IDG Se-Provinsi Gorontalo							
Tahun	Pohuwato	Bone Bolango	Boalemo	Kota Gorontalo	Kab Gorontalo	Gorontalo Utara	Provinsi Gorontalo
2017	69,62	46,97	66,59	70,64	65,76	63,28	71,09
2018	72,26	47,05	60,96	68,89	66,42	64,6	71,23
2019	68,74	51,91	68,53	75,33	62,91	76,61	70,67
2020	73,16	51,73	69,15	75,23	62,84	70,49	70,74

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

Grafik 2.6  
IDG se-Provinsi Gorontalo



Sumber : Data BPS

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis atas kondisi umum daerah Kabupaten Pohuwato, selanjutnya dirumuskan masalah pembangunan daerah dan isu-isu strategis Pengarustamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pohuwato

Masalah Pengarustamaan Gender (PUG) daerah adalah kondisi internal daerah yang menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah daerah. sedangkan isu-isu strategis Pengarustamaan Gender (PUG) adalah kondisi eksternal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dalam pembangunan yang sejahtera dan berkeadilan. Adapun yang menjadi isu strategis adalah :

##### 3.1. Isu Strategis Bidang Pendidikan

Isu Gender di bidang pendidikan meliputi :

- 1) APM untuk tingkat pendidikan dasar laki-laki dan perempuan di atas 84,02 %, yang berarti bahwa hampir seluruh penduduk usia tahun dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di sekolah dasar. Sementara untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama 77,42 %
- 2) Terdapat ketimpangan angka partisipasi sekolah pada tingkat sekolah menengah atas, baik pada laki-laki maupun perempuan hal ini disebabkan karena sedikitnya sekolah pada jenjang tersebut di daerah pedesaan, serta sulitnya transportasi untuk mengakses sekolah pada wilayah tersebut.
- 3) Partisipasi murni untuk tingkat sekolah menengah atas cukup memprihatinkan, untuk laki-laki hanya sebesar 45,17 dan perempuan sebesar 64,16 penurunan paling dratis terjadi di Kabupaten Pohuwato khususnya kelompok penduduk laki-laki,



dimana angka partisipasi murni hanya 39,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki kemungkinan putus sekolah yang lebih besar dari pada anak perempuan. Hal utama karena tuntutan ekonomi keluarga yang mewajibkan anak laki-laki untuk terlibat dalam membantu mengatasi masalah ekonomi keluarga.

- 4) Angka melek Huruf perempuan dan laki-laki Kabupaten Gorontalo yang cukup tinggi di atas 70.52 %. persen di dibawah angka nasional menunjukkan bahwa program pemberantasan buta huruf yang digulirkan pemerintah masih perlu ditingkatkan guna menekan angka buta huruf penduduk perempuan dan laki-laki.

### **3.2. Isu Strategis Bidang Kesehatan**

Isu gender di bidang kesehatan meliputi :

- 1) Angka kematian bayi dan balita masih cukup tinggi antara lain disebabkan rendahnya pengetahuan ibu tentang nutrisi dan kehamilan, kurangnya pendidikan ibu dan orang tua, dan faktor utama adalah ekonomi (kemiskinan). Data sumber dari Dinas Kesehatan Tahun 2018 Kabupaten Pohuwato, menunjukkan bahwa jumlah kematian balita Kabupaten Pohuwato 6.57 / 100.00, dengan jumlah kematian bayi sejumlah 17 orang. Angka ini naik dari tahun sebelumnya hanya 7 orang. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
- 2) Masih terjadi kasus Kematian Ibu yaitu 5 orang dari 100.000 kelahiran hidup, yang antara lain disebabkan terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan dimana perempuan biasanya menunggu suami/orang tua untuk mengambil keputusan; masih ada sebahagian masyarakat yang enggan melakukan persalinan di Puskesmas atau rumah sakit, mereka lebih memilih melakukan persalinan dirumah dengan alasan biaya lebih murah. Masih kurangnya pemahaman ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

### **3.3. Isu Strategis Bidang Ekonomi**

Isu gender di bidang ekonomi, meliputi :

- 1) Tingkat pengangguran terbuka bagi laki – laki dan perempuan pada tahun 2018 mencapai 2.081 hal ini disebabkan standar pendidikan yang masih rendah serta masih minimnya lapangan kerja. Disatu sisi tenaga kerja perempuan lebih banyak bekerja

Paraf	
ORD	Bag. Hukum


di sektor Pertanian menjadi buruh tani, dengan upah yang masih tergolong rendah.

- 2) Dalam mendukung perluasan lapangan kerja, masyarakat yang bergerak di usaha mikro khususnya perempuan, sering menghadapi kendala dalam mengakses permodalan. Berbagai persyaratan lembaga perbankan atau lembaga kredit, menyebabkan kelompok usaha kecil sering menjadi kendala yang utama. Padahal seperti diketahui mikro berperan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal, dan berpotensi meningkatkan posisi tawar (bargaining position) perempuan dalam keluarga.
- 3) Masih lemahnya perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan. Misalnya penerapan hak cuti haid dan melahirkan dan fasilitasi pemberian ASI bagi tenaga kerja perempuan yang menyusui bayi yang masih sering menjadi persoalan bagi buruh perempuan.
- 4) Masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro masih mengalami kesulitan dalam mengakses pasar (pemasaran hasil produksinya). Kelompok usaha mikro harus berhadapan dengan ketersediaan/suplai bahan baku yang tidak adekuat, serta dengan kekuatan pemilik modal yang memiliki kemampuan mengakses pasar yang lebih jauh.
- 5) Meskipun angka kemiskinan di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,87 % dari tahun 2017 namun angka kemiskinan di Kabupaten Pohuwato masih cukup tinggi yaitu sebesar 219,40 %. Masalah Kemiskinan bisa saja menjadi penyebab utama rawannya perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak

### 3.4. Isu Strategis Bidang Publik

Isu gender di bidang publik, meliputi :

- 1) Terdapat ketimpangan proporsi pejabat eksekutif perempuan dan laki-laki, khususnya pada jenjang yang lebih tinggi. Pejabat eselon II, Eselon III dan Eselon IV masih didominasi sebagian besar oleh laki – laki yaitu sebesar 76,60 %

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- 2) Keterwakilan perempuan di lembaga di lembaga legislative belum mencapai 30%. Kondisi ini terjadi di semua Kabupaten/Kota, meskipun jika dibandingkan periode sebelumnya proporsi perempuan telah meningkat. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten sebanyak 5 Orang untuk Priode 2019 - 2023 hanya 4 orang.
- 3) Fungsi dan Peran Pokja PUG, terutama di tingkat Kabupaten/Kota yang belum optimal.
- 4) Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pohuwato yang masih terbatas.

## **BAB IV**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Guna pencapaian Rencana Aksi Pengarustamaan Gender, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Pengarustamaan Gender Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2025. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang holistic, tematik dan terintegratif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Pohuwato melakukan upaya untuk mencapai, tujuan dan sasaran serta target kinerja Rencana Aksi Pengarustamaan Gender dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

#### **4.1. Strategi**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya Rencana Aksi Pengarustamaan Gender. Dalam RPJMD sendiri pengarustamaan gender tertuang pada semua misi namun untuk lebih spesifik lagi tertuang dalam Misi Ke 3 RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026. Adapun Misi Kabupaten Pohuwato yang mendukung aksi Pengarustamaan Gender dijelaskan secara detail sebagai berikut :

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

#### **4.1.1.Misi 3. Mewujudkan masyarakat yang produktif dan inovatif**

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 3, akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

1. Menjadikan Pohuwato sebagai lumbung pangan di Provinsi Gorontalo.
2. Menjadikan kabupaten Pohuwato sebagai lumbung ternak di Provinsi Gorontalo
3. Meningkatkan kualitas usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal
4. Meningkatkan manajemen pengembangan pariwisata strategis daerah berbasis budaya dan kearifan lokal
5. Menumbuh kembangkan investasi yang bisa menyerap tenaga kerja lokal dan bekerjasama dengan masyarakat
6. Meningkatkan SDM dan produktifitas tenaga kerja
7. Meningkatkan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
8. Meningkatkan perlindungan sosial
9. Meningkatkan peran dan fungsi fasilitator pendamping dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
10. Peningkatkan komptensi kerja, kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan
11. Peningkatan kemitraan antar level pemerintah dalam pemberdayaan pemuda penganggur
12. Peningkatan iklim investasi yang kondusif

#### **4.2. ArahKebijakan**

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Aksi Pengarustamaan Gender yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 pada Misi ke 3 dapat dicapai dengan baik.

#### **Arah Kebijakan Misi 3. Mewujudkan masyarakat yang produktif dan inovatif**

Adapun arah kebijakan dalam mencapai misi 3 meliputi :

1. Peningkatan Intensifikasi/ekstensifikasi, kualitas dan tata niaga pertanian, perkebunan dan perikanan Tujuan arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	


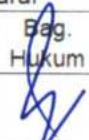


dan perkebunan serta pengembangan perikanan dan peternakan. Adapun kebijakan umum mencakup antaranya :

- Peningkatan produksi dan produktivitas jagung dengan mengedepankan sistem pertanian organik
- Peningkatan produksi dan produktivitas padi dengan mengedepankan sistem pertanian organik
- Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman coklat dengan mengedepankan sistem pertanian organik
- Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman buah-buahan dengan mengedepankan sistem pertanian organik
- Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi rica, tomat dan bawang dengan mengedepankan sistem pertanian organik
- Penyediaan bibit tanaman perkebunan dengan prioritas lokasi lahan pada kemiringan 15 persen keatas
- Penyediaan benih padi dan jagung
- Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian
- Pembangunan jalan usaha tani
- Penyediaan obat-obatan
- Penyediaan pupuk gratis dan bersubsidi
- Pengadaan bantuan ternak
- Penguatan kelembagaan pertanian
- Pembuatan kawasan percontohan pembibitan dan pengembangan budidaya taripang dan nila salinitas
- Pengadaan perahu fiber
- Pengadaan peralatan perikanan tangkap
- Peningkatan sarana dan prasarana balai benih ikan
- Pembukaan jaringan pemasaran untuk produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan
- Pengembangan kawasan-kawasan ekonomi berbasis komoditi unggulan lokal

## 2. Pengembangan agribisnis peternakan

Arah kebijakan ini ditujukan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian terintegrasi peternakan sehingga pendapatan petani meningkat. Adapun kebijakan umum yang akan dilaksanakan adalah :

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- Pembuatan blue print pengembangan peternakan di Kabupaten Pohuwato
  - Pengembangan peternakan rakyat berbasis koperasi dan bumdes
  - Terus memantapkan kerjasama dengan Kabupaten Gorontalo utara untuk kemudahan pemasaran ternak.
  - Peningkatan SDM Peternakan
  - Peningkatan sarana produksi peternakan
  - Peningkatan sarana penunjang pengembangan peternakan
  - Pendampingan program peternakan
3. Pengembangan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM dengan semboyan Bela, Berdayakan dan Beli Prodak Lokal (B3PL)  
Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah. Adapun kebijakan umum mencakup :
- Penguatan kelembagaan asosiasi industri pohuwato
  - Peningkatan SDM pelaku industri
  - Memprioritaskan bantuan kepada tenaga kerja yang bersertifikat, yang telah dilatih BLK Pohuwato atau lembaga lainnya.
  - Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan wira usaha baru berbasis komoditi unggulan daerah
  - Pendampingan dan pembinaan wirausaha menuju kemandirian
  - Penyediaan sarana dan prasarana industri
  - Revitalisasi pasar sebagai pusat perdagangan
  - Penguatan peran dan fungsi koperasi
  - Pembemberdayaam koperasi dan UMKM
  - Menumbuhkan gerakan Bela, Berdayakan dan Beli Prodak Lokal (B3PL)
4. Pengembangan dan diversifikasi pangan  
Arah kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan pangan lokal serta diragam jenis pangan lokal. Adapun kebijakan umum yang akan dilaksanakan, antaranya adalah :
- Penuntasan desa rawan pangan
  - Peningkatan konsumsi kalori per kapita per hari
  - Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan
  - Penyediaan cadangan pangan
  - Kampanye konsumsi pangan lokal

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



5. Menjadikan Pohuwato menuju pusat ekonomi dan pariwisata dikawasan Teluk Tomini

Arah kebijakan ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi kawasan teluk tomini untuk kemajuan dan daerah dan kesejahteraan masyarakat pohuwato. Kebijakan umum mencakup antaranya :

- Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk riset dan pengembangan kawasan teluk tomini.
- Membangun kerjasama antara daerah yang berada di kawasan teluk tomini, utamanya kontivitas pariwisata, jasa transportasi dan layanan kesehatan

6. Peningkatan perlindungan sosial, pengarusutamaan gender serta pemberdayaan perempuan

Arah kebijakan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan peningkatan pemberdayaan perempuan. Adapun kebijakan umum mencakup, antaranya :

- Terus mengupdate, menjaga kualitas dan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan OPD terkait sebagai basis utama sasaran program penanggulangan kemiskinan.
- Penyediaan program perlindungan sosial berupa asuransi petani jagung, padi, ternak, perikanan, ketenagakerjaan dan kesehatan
- Penyediaan program bantuan sosial bagi warga miskin
- Peningkatan peran dan fungsi organisasi perempuan dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan potensi lainnya
- Pemberdayaan kepada Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
- Pemberdayaan oragnisasi perempuan
- Peningkatan sisitem perencanaan dan penganggaran berbasis gender

7. Perbaiki pelayanan sistem investasi

Arah kebijakan ini bertujuan untuk kemudahan dan meningkatkan iklim investasi di Pohuwato. Adapun kebijakan umum mencakup, antaranya :

- Penyediaan pelayanan perizinan berbasis sistem informasi secara on line
- Perbaiki sarana dan prasarana pendukung pelayanan investasi
- Perbaiki sistem layanan
- Pengembangan regulasi yang mendukung investasi

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- Peningkatan SDM layanan investasi
  - Peningkatan nilai dan realisasi investasi
8. Perbaikan sistem ketenaga kerjaan dan pengangguran
- Arah kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap tenaga kerja serta menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun kebijakan umum mencakup, antaranya :
- Peningkatan SDM tenaga kerja
  - Pembinaan dan evaluasi para pekerja diperusahaan
  - Peningkatan peran dan fungsi balai latihan kerja
  - Peningkatan sarana dan prasarana balai latihan kerja
  - Penyediaan data base pencari kerja
  - Pendampingan ketenaga kerjaan
9. Pengembangan infrastruktur, sosial dan ekonomi transmigrasi
- Arah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, sosial dan ekonomi kawasan transmigrasi. Adapun kebijakan umum yang akan dilaksanakan, antaranya :
- Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, dan air bersih
  - Penyediaan akses telekomunikasi
  - Penyediaan akses ekonomi
  - Penyediaan fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan
  - Penyediaan fasilitas sosial
  - Pemberdayaan ekonomi

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengarusutamaan gender sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, sehingga pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan program dan kegiatan perlu dilanjutkan baik dalam sistem perencanaan , penganggaran, pelaksanaan dan monitoring

Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Pohuwato tahun 2021 - 2025, maka diharapkan dapat menginformasikan lebih jelas tentang kondisi permasalahan gender dan anak, masalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, politik, hukum, dan sosial budaya, perlindungan perempuan dan anak serta data kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG). Sehingga diharapkan dapat



menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan strategi dan kebijakan terkait PUG.

Adapun sasaran yang diharapkan dengan tersusunnya Rencana Aksi Daerah Kabupaten Pohiwato adalah tersedianya data base gender dan anak sebagai data bersama dalam menentukan arah program kerja sekaligus referensi dalam menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta anak di Kabupaten Pohuwato .

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI										
KABID	PP&PUG	KEPALA	DP3AP2KB	KABID HUKUM	ASISTEN	BMKESRA	ASISTEN	.....	SEKDA	WABUP
										

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

### 1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan pada bab ini adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Secara detil permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut :


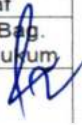
#### 1.1. Kesehatan

Posisi kabupaten Pohuwato yang sangat strategis, menjadi jalan poros utama lintas Sulawesi, terdapat dua pelabuhan yakni pelabuhan Samudra dan pelabuhan penyeberangan yang berada di kecamatan Paguat. Disamping itu terdapat 1 pelabuhan swasta juga di Kecamatan Paguat dan satu lagi akan dibangun ditahun 2022 di kecamatan Popayato. Juga ditargetkan pada tahun 2023 Bandara Udara Pohuwato akan beroperasi yang terdapat di Kecamatan Randangan. Dari kacamata kesehatan semua ini berpotensi terhadap masuknya berbagai macam penyakit menular, seperti covid 19 yang hingga tahun 2021 belum ada indikasi untuk segera berakhir.

Permasalahan covid 19 hingga saat ini masih menjadi momok dan berdampak pada perekonomian daerah Kabupaten Pohuwato. Hingga tanggal 6 Mei 2021 terdapat 6 orang kasus positif, 288 orang sembuh, 6 orang meninggal, total kasus sebanyak 301 orang. Upaya pemerintah daerah terus melaksanakan penegakan protokol kesehatan bahkan sudah didukung dengan peraturan daerah, namun demikian masyarakat mulai banyak yang tidak teralalu menggubris terkait prokes ini, utamanya pada kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Sementara itu untuk pelaksanaan vaksin belum berjalan sesuai harapan karena ketersediaan vaksin juga yang masih terbatas. Dari target 108.191 yang akan divaksin, baru sekitar 6000 yang telah terealisasi hingga Mei 2021. Dengan demikian dukungan operasional pelaksanaan vaksin masih akan menjadi prioritas pemerintah daerah dalam kurun 1 – 2 tahun kedepan.

Topografi daerah Pohuwato yang berada dipesisir dan cenderung banyak rawa serta sering terjadi genangan pada musim hujan sangat rentan dengan penyakit deman berdarah. Tercatat penyakit ini sering muncul kasusnya setiap tahun, utamanya pada musim hujan.

Permasalahan kesehatan penyelesaiannya diukur dalam 4 indikator utama yakni angka harapan hidup, angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta stunting. Pada bab II perkembangan kasusnya

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



dapat dilihat untuk lima tahun terakhir, dimana secara umum usia harapan hidup Kabupaten Pohuwato masih berada di urutan 5 dari 6 Kab/Kota di Provinsi Gorontalo dan masih terdapat kasus kematian ibu dan kematian bayi. Untuk stunting, sejak ditetapkan menjadi lokus tahun 2019, terjadi kemajuan dalam pencapaiannya dimana pada tahun 2019 sudah dibawah 10 persen, dan hal ini akan terus dipacu dan diturunkan kedepan.

Derajat kesehatan masyarakat belum optimal disebabkan beberapa aspek yakni :


- Masih rendahnya kualitas kesehatan keluarga

Rendahnya kualitas kesehatan keluarga tercermin dari perilaku hidup bersih dan sehat yang belum maksimal dan masih terdapatnya kasus-kasus bayi stunting. Stunting salah satunya disebabkan oleh kebersihan lingkungan termasuk didalamnya lingkungan rumah yang belum baik, belum berjangsan dan pola asuh anak yang belum tepat.

- Infrastruktur dan SDM Kesehatan yang belum merata

Secara umum Ketersediaan infrastruktur kesehatan sebagaimana disajikan di bab II, terdapat 2 RSUD yakni Rumah Sakit Bumi Panua dan Satu Rumah Sakit Pratama dibangun tahun 2020 dan diperkirakan beroperasi tahun 2021. Sementara itu terdapat 16 Puskesmas, 8 puskes telah direvitalisasi pembangunannya sehingga menjadi lebih sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, sisa 8 puskes lagi yang masih membutuhkan revitalisasi. Revitalisasi puskesmas dan penyempurnaan kebutuhan infrastruktur ini menjadi prioritas penanganan kedepan.

Dari aspek SDM kesehatan, untuk RSUD Bumi Panua sebagian besar sudah terpenuhi, hingga tahun 2021 telah terdapat 11 dokter spesialis. Hanya permasalahan di RSUD adalah luas lahan yang sudah sempit sehingga penambahan bangunan sudah sulit kecuali konsep pembangunan vertical (dua hingga tiga lantai). Sementara itu untuk Rumah Sakit Pratama masih Gorontalo Barat membutuhkan penambahan gedung penunjang dan lebih utama lagi pemenuhan tenaga medis dan non medis. Tahun ini struktur organisasi akan difinalkan dan mengidentifikasi petugas-petugas yang akan ditugaskan ditempat ini serta merekrut tenaga sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, agar rumah sakit ini segera bermanfaat untuk masyarakat.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Selanjutnya permasalahan SDM kesehatan di 16 Puskesmas umumnya belum terpenuhi sesuai kebutuhan. Tahun ini sudah dilaksanakan evaluasi kebutuhan SDM berbagai formasi yang kosong telah disepakati dengan badan kepegawaian untuk dibuka formasi tahun-tahun kedepan. Kebutuhan dokter diseluruh puskesmas belum terpenuhi secara permanen, bahkan untuk hal ini pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan beasiswa satu dokter satu kecamatan sejak tahun 2016 hingga 2021. Tahun 2021 target 13 orang beasiswa ini telah terpenuhi, sehingga untuk periode pemerintahan 2021 – 2026 tinggal menyempurnakan lagi ke tambahan studi 2 tahun Bahkan kedepan kebijakan ini akan diteruskan dengan tujuan agar kebutuhan dokter benar-benar terpenuhi dari warga masyarakat setempat sehingga tidak terjadi kekosongan pelayanan dokter dipuskesmas. Karena permasalahan yang selama ini dihadapi adalah para dokter yang ditempatkan, utamanya di daerah yang terpencil kurang betah dan mudah pindah tugas ke tempat asalnya. Selain rekrutmen, peningkatan kapasitas SDM kesehatan secara rutin setiap tahunnya juga perlu dilaksanakan agar kinerja pelayanan semakin baik kedepan.

- Belum optimalnya akses pelayanan kesehatan

Permasalahan layanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin melalui BPJS belum optimal dilakukan. Disamping permasalahan data warga miskin yang cukup kompleks permasalahannya mulai dari tidak adanya NIK yang sebagian besar disebabkan status perkawinan, juga kemampuan keuangan daerah untuk membiayai seluruh warga miskin yang terdapat di DTKS hingga tahun 2020 sekitar 18.682 Rumah Tangga, yang terakomodir pada BPJS baru sekitar 60 persen. Kedepan pemerintah daerah akan berupaya untuk terus meningkatkan kepersertaan warga masyarakat dalam BPJS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## 1.2. Pendidikan

Jika dilihat dari capaian Indkes Pembangunan Manusia (IPM) hingga tahun 2020 pada angka 63,37 sebagaimana tersaji pada bab II. Setiap tahun terdapat peningkatan namun masih sangat rendah, belum signifikan dan dengan kondisi ini ranking IPM Kabupaten Puhwato masih berada di ranking 5 dari 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam dunia Pendidikan adalah sebagai berikut :

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



1. Rata-rata lama sekolah masih rendah

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pohuwato sebagaimana pada bab II grafik 2.17, tahun 2020 berada pada angka 7,12 tahun, artinya sebagian besar masyarakat pohuwato hanya lulusan sekolah dasar. Tentu hal ini sangat terkait dengan kondisi kemampuan masyarakat, kesadaran pentingnya pendidikan dan akses terhadap pendidikan. Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah tentang pendidikan gratis, ditambah dukungan beasiswa bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang berprestasi serta dukungan regulasi Pendidikan wajib 12 tahun, diharapkan kedepan angka rata-rata lama sekolah ini akan terus membaik.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) level PAUD/TK dan SMP Sederajat rendah

Perkembangan APM disemua level Pendidikan menjadi salah satu indikator kinerja utama sektor Pendidikan. Perkembangan APM sebagaimana disajikan di Bab II tabel 2.40 nampak bahwa untuk APM SMP Sederajat mengalami penurunan dibanding tahun 2019 bahkan capaiannya dibawah 70 persen, sangat jauh dari target nasional pada angka 90 persen. Semnetara itu untuk Sekolah TK capaian APM nya masih pada angka 51 persen. Hal ini masih jauh dari harapan dan target nasional. Untuk APM SD Sederajat tinggal dipertahankan capaiannya setiap tahun.


Terkait APM yang masih rendah, beberapa aspek penyebabnya yakni :

- Tingkat Kesadaran Orang Tua

Untuk Sekolah Taman Kanak-Kanak (STK) dari aspek ketersediaan sekolah sudah cukup merata, hingga tahun 2020 terdapat 104 STK Negeri dan Swasta dan 7 Sekolah Raudatul Athfal (RA). Sebagian besar orang tua belum memasukkan anaknya ke jenjang ini karena faktor kesadaran dan juga faktor ekonomi.

Sementara itu pada level SMP Sederajat, permasalahannya demi kepentingan pemenuhan ekonomi kadang orang tua setelah anaknya lulus sekolah SD sederajat, tidak lagi melanjutkan ke SMP, sebagian besar dipanggil membantu pekerjaan di kebun. Kadang juga terjadi sebaliknya, karena anak tidak tega lihat orang tuanya kerja sendiri, mereka memilih membantu orang tua dari pada melanjutkan pendidikan. Hingga tahun 2020 terdapat 32,44

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



persen anak usia 7 – 24 tahun yang tidak berskolah lagi (Bab II, tabel 2.42). Dengan adanya kondisi ini, maka sosialisasi, edukasi dan komunikasi dengan masyarakat perlu ditingkatkan bahkan perlu ada regulasi yang memaksa bagi para orang tua untuk memenuhi hak pendidikan anaknya. Kebijakan ini juga akan paralel dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis sektor pertanian dan perikanan.

- Akses Pendidikan

Seluruh jenjang pendidikan mulai dari level STK hingga SMA/SMK sederajat sudah berada di Kabupaten Pohuwato dan tersebar merata di 13 Kecamatan. Namun diakui jarak sekolah dari tempat domisili siswa masih ada yang cukup jauh sehingga membutuhkan biaya-biaya transportasi. Selain itu bantuan seragam dan perlengkapan sekolah masih dibutuhkan kedepan, khusus bagi warga miskin

- Manajemen mutu Pendidikan

Peningkatan mutu Pendidikan ditentukan kualitas guru, sarana dan prasarana pendukung. Untuk para Guru, kualifikasi Pendidikan agar terus ditingkatkan. Demikian juga dengan tenaga non kependidikan. Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan diupayakan dicapai sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

3. Masih rendahnya prestasi generasi muda dan olahraga

Generasi yang berprestasi disegala bidang merupakan target utama dalam pembangunan kepemudaan. Prestasi akan muncul ketika seluruh komponen yang menunjangnya tersedia dan dimanfaatkan secara baik. Beberapa aspek yang menjadi penyebab rendahnya prestasi generasi muda yakni :

1. Kurangnya pembinaan

Organisasi kepemudaan di Kabupaten Pohuwato cukup berkembang dengan baik, akan tetapi kurangnya pembinaan dalam kompetensi tertentu sehingga belum bisa bersaing ditingkat regional bahkan nasional.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

Banyak pemuda yang memiliki bakat dibidang kesenian, teknologi informasi, olahraga, keterampilan tertentu, tetapi karena belum didukung dengan prasarana memadai sehingga belum bisa

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



berkembang dengan baik. Keberadaan gedung kesenian di Kabupaten belum ada hingga saat ini, kelembagaannya pun baru terbentuk tahun 2021 dan belum bisa eksis dengan baik. Prasarana olah raga belum merata disetiap Kecamatan, pembinaannya pun belum optimal sehingga belum bisa mengantarkan Pohnuato tampil secara baik diberbagai ivent olahraga.

#### 4. Masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan


Membaca adalah pintu utama kecerdasan, dengan membaca kita akan selalu mendapatkan pengetahuan dan informasi yang baru. Salah satu fasilitas yang mendukung untuk kegiatan membaca tersebut adalah keberadaan perpustakaan. Prasarana perpustakaan di Kabupaten, Desa/Kelurahan dan sekolah-sekolah umumnya sudah ada, namun belum berfungsi dengan baik. Penyebabnya adalah manajemen pengelolaan perpustakaan yang belum baik dan belum disesuaikan dengan kondisi di era teknologi informasi saat ini. Selain itu kurangnya buku-buku yang sesuai dengan jenis kebutuhan masyarakat sehingga mereka tidak berminat untuk membacanya. Sosialisasi terkait fungsi perpustakaan harus terus menerus dilakukan.

### 1.3. Kebudayaan

Provinsi Gorontalo termasuk didalamnya Kabupaten Pohnuato dikenal dengan daerah adat dengan motto **adat bersandikan sara' dan sara' bersandikan alquran**. Pada praktek kehidupan sosial masyarakat sehari-hari kegiatan adat ini sudah menjadi budaya, mulai dari proses perkawinan, pembeatan, penyelenggaraan jenazah, dll. Dari kegiatan keagamaan sangat nampak pada peringatan hari-hari besar islam. Permasalahan utama pada aspek kebudayaan ini adalah regenerasi. Sebagian besar petugas adat dan pelaku budaya saat ini adalah generasi yang sudah uzur, kaum millennial kurang tertarik dengan kegiatan-kegiatan ini. Kesenian-kesenian yang bernafaskan budaya lokal juga sudah kurang berkembang, vestipal-vestipal kesenian daerah sudah jarang dilakukan, sehingga berpengaruh terhadap pudarnya budaya lokal daerah. Pengintegrasian ivent budaya dengan pariwisata akan lebih efektif dilaksanakan kedepan.

Dari aspek cagar budaya, salah satu kecamatan yang menjadi kedudukan pemerintahan Belanda dulu sekitar tahun 1800 san adalah Kecamatan Paguat yang dikenal dengan Kota Tua. Ditempat ini banyak

Paraf	
OP	Bag. Hukum



terdapat bangunan-bangunan kuno yang hingga saat ini belum ditetapkan menjadi cagar budaya daerah. Letak kecamatan Paguat yang berada dalam kompleks Pelabuhan cocok dikembangkan menjadi salah satu destinasi budaya dengan bangunan kuno tersebut.

#### 1.4. Kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama berdirinya sebuah daerah otonom. Pengukuran kesejahteraan masyarakat suatu daerah diukur melalui pencapaian indikator makro pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, kemiskinan, gini ratio, pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato sebagaimana pada bab II grafik 2.7 nampak bahwa sejak tahun 2016 s/d 2019 terjadi perlambatan, selanjutnya tahun 2020 mengalami kontraksi tinggi jatuh pada angka -0,18 persen. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab hal ini yakni :

- Investasi yang belum beroperasi maksimal

Perkembangan investasi tidak maksimal karena dari 17 investasi yang sudah masuk ke Pohuwato (tabel 2.8 bab II) terdapat sembilan investor yang hingga tahun 2021 belum berjalan maksimal, sehingga tidak memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi daerah. Belum berjalan maksimal karena ada yang dilanda konflik internal organisasi, ada yang karena produknya (sawit) tertolak dipasaran international.

- Produksi pertanian yang masih rendah

Pertanian jagung merupakan komoditi unggulan dan strategis daerah karena sekitar 50 persen masyarakat berada dalam jenis pekerjaan ini. Namun dikondisi 5 tahun terakhir, produksi jagung cenderung statis sebagaimana tersaji di bab II tabel 2.17 dimana tahun 2020 dengan luasan tanam 84.654 ha produksi yang dicapai sebesar 429.265,19 atau hanya 5,1 ton per ha. Capaian ini sangat rendah bila dibanding dengan potensi produksi bibit jagung hibrida 8 – 10 ton pe ha yang selama ini dibagikan kepada masyarakat petani. Kondisi yang sama pula terjadi pada komoditi padi, buah-buahan dan tanaman perkebunan lainnya. Penyebab utama hal ini adalah berkurangnya unsur hara tanah dan sistem pertanian yang masih tradisional. Sehingga gerakan pertanian kedepan agar lebih fokus pada Gerakan rehabilitasi kesuburan tanah dengan pupuk organik.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



Selanjutnya rendahnya produktivitas pertanian utamanya jenis tanaman pangan juga akan berpengaruh pada ketahanan pangan daerah. Kurangnya stok pangan ini juga berdampak pada kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas pangan daerah, apalagi masih terdapat sekitar 21 desa yang masih masuk dalam status desa rawan pangan.

Untuk komoditi peternakan, pengembangannya sangat menjanjikan di Kabupaten Pohuwato, karena disamping lahan masih luas, makanan yang bersumber dari limbah pertanian juga banyak. Pada bab II tabel 2,23 nampak bahwa peternakan sapi merata diseluruh kecamatan, kemudian kambing kecuali di kec. Buntulia dan ternak babi kecuali di 4 kecamatan. Permasalahan utama pengembangan peternakan tersebut adalah sistem pemeliharaan yang masih tradisional, masih lebih banyak dilepas di alam sehingga perkembangannya pun lambat. Sementara itu, untuk ternak unggas, ternak ayam kampung yang merata dikembangkan diseluruh kecamatan, namun masih juga dengan sistem tradisional. Beberapa kecamatan telah mengembangkan ayam petelur secara peternakan modern. Sedangkan untuk ayam pedaging belum ada dikembangkan. Pada ternak itik juga kondisi tidak jauh beda sistem pemeliharaannya sehingga belum memberikan tambahan pendapatan signifikan kepada peternak.

- Produksi Perikanan belum maksimal

Kabupaten Pohuwato berada dalam Kawasan Teluk Tomini Pulau Sulawesi dan dari 13 kecamatan yang ada, 10 kecamatan berada dalam Kawasan pesisir Teluk Tomini dengan panjang pantai 165 Km. Pencapaian pembangunan perikanan diukur dari peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya.

Untuk perikanan tangkap sebagaimana tersaji pada bab II tabel 2.25 nampak bahwa hingga tahun 2020 sebesar 26.148 ton yang dihasilkan oleh 2.364 Rumah Tangga Perikanan (RTP). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa produksi per rumah tangga setiap bulan sekitar 93 Kg. Bila setiap Kg ikan dihargai maksimal Rp. 50.000 maka rata-rata pendapatan kotor rumah tangga perikanan perbulan sebesar Rp. 4.650.000. Pendapatan sudah cukup tinggi dan sudah melampaui garis kemiskinan Kabupaten Pohuwato yang berada pada angka 1,2 jutaan per RT. Namun pendapatan ini tidak selalu stabil, sangat ditentukan oleh cuaca di laut setiap tahunnya.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



Disamping itu juga sangat ditentukan oleh peralatan dan perlengkapan penangkap ikan yang dimiliki nelayan. Selain itu pengawasan belum optimal sehingga Praktek illegal fishing masih terjadi dan hal ini secara jangka panjang berdampak terhadap ekosistem terumbu karang dan menurunnya stok ikan di Teluk Tomini. Pada perikanan budidaya, sebagaimana pada tabel yang sama, jumlah produksi tahun 2020 mencapai 21.687 ton, menurun jika dibandingkan produksi tahun 2018 dan 2019. Permasalahan pada perikanan budidaya ini khususnya untuk budidaya air payau sebagian besar adalah budidaya ikan bandeng dan udang yang memanfaatkan sumber daya pesisir Pohuwato dimana ditempat itu tumbuh hutan mangrove. Masifnya kegiatan pertambakan ini, menjadi penyebab banyak ekosistem mangrove yang rusak sehingga berdampak pada berkurangnya tempat pemijahan ikan dan pemasok oksigen. Teknik budidaya yang tidak mengindahkan lingkungan menjadi permasalahan utama dalam pengembangan perikanan budidaya ini. Sementara itu untuk pengembangan perikanan budidaya, perikanan terapung seperti budidaya taripang, budidaya ikan nila salinitas, budidaya ikan kerapu, dll belum menjadi budaya nelayan sehingga belum berkembang dengan baik.

- Pemanfaatan sumber daya hutan belum maksimal  
Tutupan lahan di Kabupaten Pohuwato sekitar 70 persen adalah kawaasan hutan sebagaimana tersaji pada bab II tabel 2.31. itulah sebabnya daerah ini memiliki banyak jenis flora dan fauna, beberapa diantaranya adalah endemic dan dilindungi pemerintah. Potensi kehutanan yang banyak dimanfaatkan masyarakat adalah madu, rotan, dll. Permasalahan utama diaspek kehutanan ini adalah tingginya tingkat kerusakan hutan, baik pada hutan lindung maupun hutan konservasi. Penyelesaian kerusakan ini semakin rumit karena level kewenangan yang berbeda-beda, dimana untuk hutan lindung menjadi kewenangan provinsi sementara untuk cagar alam kewenangan instansi vertikal. Selanjutnya untuk areal penggunaan lain adalah kewenangan kabupaten.

Kerusakan hutan juga ini telah berdampak pada kejadian banjir yang melanda setiap tahunnya. Berdasarkan dokumen KLHS tahun 2021, Beberapa kejadian banjir di Kabaupten Pohuwato yakni :

1. Tanggal 19 September 2020, banjir menerjang 4 kecamatan yaitu Kecamatan Marisa, Duhiadaa, Buntulia dan Patilanggio. Akibat

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



banjir tersebut, sebanyak 2.874 jiwa atau 940 kepala keluarga (KK) terdampak. Rinciannya Desa Manawa, Patilanggio 54 KK/198 jiwa dan Desa Sipatana, Buntulia sebanyak 100 KK/244 Jiwa. Untuk Kecamatan Duhiadaa ada tiga desa terdampak banjir yakni Desa Buntulia Barat sebanyak 44 KK/185 jiwa, Desa Buntulia Jaya 40 KK/195 jiwa, dan Desa Buntulia Selatan 381 KK/904 jiwa. Sementara Kecamatan Marisa terdapat dua desa terdampak banjir yakni Desa Botubilotahu 70 KK/253 jiwa dan Desa Teratai 251 KK/895 jiwa.

2. Tanggal 16 Juni 2019, banjir melanda 4 kecamatan yaitu: Paguat, Wonggarasi, Taluditi dan Patilanggio. Total warga yang terdampak mencapai 1270 jiwa
3. Tanggal 5 Mei 2019, banjir menerjang kecamatan Paguat dan Popayato Barat. Sedikitnya 30 unit ruma terendam banjir dengan jumlah warga yang terdampak banjir mencapa 100 jiwa
4. Tanggal 1 Mei 2018 Banjir melanda Kecamatan Popayato. Sedikitnya 20 rumah terendam banjir
5. Tanggal 5 Juni 2017, banjir melanda 4 kecamatan yaitu: Taluditi, Randangan, Patilanggio dan Wonggarasi. Warga yang terdampak berjumlah 4000 jiw

Kerusakan hutan juga mengganggu debit air yang masuk ke berbagai IPA (instalasi Pengelolaan Air) PDAM sehingga pasokan air ke masyarakat berkurang, utamanya pada musim kemarau. Hal ini juga senada dengan dokumen KLHS tahun 2021, bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisa spasial terdapat terdapat 55.983,38 hektar atau 13% lahan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato yang memberikan daya tampung tinggi dalam jasa pengaturan pemurnian air dan pengelolaan limbah namun 114.959,07 hektar atau 61,21% lahan Kabupaten Pohuwato yang memberikan jasa pengaturan pemurnian air kategori rendah
  2. Wilayah dengan daya tampung tinggi adalah Kecamatan Popayato Timur dan Kecamatan Lemito sedangkan daya tampung rendah di kecamatan Paguat, Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Marisa
- Pengelolaan Pertambangan yang belum legal
- Pohuwato memiliki potensi pertambangan yang cukup tinggi, utamanya emas, galian c, dll sebagaimana pada bab II tabel 2.30. Permasalahan yang dihadapi pada pertambangan ini, khususnya pertambangan emas adalah belum adanya Wilayah Pertambangan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



Rakyat (WPR). Pertambangan rakyat saat ini masif dengan tanpa izin dan pengelolaannya masih jauh dari kaidah lingkungan. Dampaknya sebagian besar wilayah sungai pohuwato terus mengalami kedangkalan yang disebabkan tingginya kiriman sedimentasi berupa pasir dan kerikil akibat dari proses pertambangan tersebut. Belum adanya peralatan yang sederhana untuk mengolah emas dengan ramah lingkungan juga menjadi salah satu penyebab pengelolaan pertambangan ini. Selain itu Program pemberdayaan bagi keluarga penambang juga belum berjalan dengan baik.

- Pengembangan UMKM yang belum maksimal

Berdasarkan data BPS Pohuwato tahun 2019, jumlah perusahaan industri yang ada di Kabupaten Pohuwato adalah sebanyak 2.416 perusahaan yang mampu menyerap tenaga sebanyak 5.109 orang. Selanjutnya untuk jenis perdagangan terdapat Jumlah Pedagang besar sebanyak 345, Pedagang menengah 574, Jumlah Kios sebanyak 5260 kios dan Jumlah warung sebanyak 1257 warung.


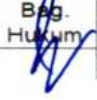
Khusus industri, permasalahan yang dihadapi adalah sulitnya hasil-hasil industri terserap oleh pasar. Penyebabnya sebagian besar belum punya izin, merek, label halal, dll. Kelembagaan yang menaungi industri juga belum berperan maksimal, juga variasi produk yang belum mampu bersaing dipasar-pasar modern.

Selanjutnya khusus UKM yang bergerak dalam bidang perdagangan, lemahnya permodalan dan manajemen usaha menjadi penyebab usaha ini sulit maju. Selanjutnya Untuk menunjang kegiatan ekonominya, masyarakat kabupaten Pohuwato menggunakan pasar sebagai sarana untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa dimana hingga tahun 2019 terdapat 17 pasar. Dari 17 pasar tersebut, sebagian besar masih bermasalah dalam penataan, kelembagaan, kebersihan dan pemeliharaan gedung.

- Sektor pariwisata yang belum maksimal

Letak geografis Pohuwato yang berada dalam Kawasan Teluk Tomini dengan bentang alam ada yang dipesisir dan ada yang di kawasan hutan, menyebabkan daerah ini memiliki banyak ragam obyek wisata sebagaimana tersaji di Bab II tabel 2.28.

Belum maksimalnya kunjungan wisata, utamanya pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi covid 19. Permasalahan lainnya adalah masih lemahnya promosi wisata, sarana dan prasarana wisata yang belum baik serta kelembagaan wisata yang belum terbina

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



dengan baik. Selain itu belum terbentuk masyarakat sadar wisata sehingga benar-benar searah dengan kebijakan pengembangan wisata yang pemerintah jalankan.

Kemudian dari aspek PDRB perkapita hingga tahun 2020 terus terjadi peningkatan dimana untuk PDRB perkapita atas harga berlaku sebesar 41,04 juta rupiah dan PDRB perkapita atas harga konstan sebesar 28,57 juta rupiah. Walaupun terjadi peningkatan setiap tahun, tetapi gap antara yang kaya dan miskin masih cukup jauh, yakni sebesar 0,408. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum stabilnya tingkat pendapatan masyarakat, khususnya para petani jagung yang sebagian besar tergantung pada kondisi iklim. Komoditi jagung sangat peka terhadap iklim, dua minggu saja tidak mendapatkan air hujan, tanaman ini akan kering. Kedepan variasi tanaman (*mix farming*) agar dilakukan dalam pengembangan pertanian, khususnya tanaman-tanaman perkebunan dan buah-buahan.

Tingkat pendapatan yang tidak stabil juga berdampak pada masih tingginya angka Kemiskinan pohanwato walaupun pada 5 tahun terakhir terjadi penurunan setiap tahunnya. Demikian juga dengan tingkat pengangguran. Pada tahun 2020 angka kemiskinan pohanwato sebesar 17,62 persen, sedangkan angka pengangguran sebesar 3,1 persen dari angkatan kerja. Dengan kondisi sosial ekonomi seperti ini, maka program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal agar ditingkatkan. Selain pendekatan pemberdayaan, masyarakat pohanwato juga masih harus ditopang dengan berbagai program perlindungan sosial

#### **1.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan pada aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga tahun 2020 meningkat yakni 20 kasus bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu hanya 7 kasus. Pada kondisi kasus tersebut sangat di dominasi oleh kasus anak yakni 29 kasus tahun 2019 dan 20 kasus tahun 2020. Permasalahan lainnya adalah masih banyak status Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang belum terberdayakan, juga sekitar 6000 kepala keluarga yang masih bermasalah dengan status pernikahannya sehingga menjadi masalah terhadap hak-hak anak dimasa mendatang, utamanya dalam aspek pendidikan.

Paraf	
OPD	Bab. Hukum
	

## 2. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

### Isu strategis 1 . Kebijakan Pengembangan Bidang Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman dan bertaqwa	Pendidikan mudah, terjangkau dan berkualitas serta generasi muda mampu berprestasi disegala bidang.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.</li><li>2. Meningkatkan pembinaan dan pengamalan keagamaan, khususnya pendidikan agama Islam.</li><li>3. Menyediakan biaya operasional sekolah.</li><li>4. Meningkatkan pelayanan bus sekolah gratis.</li><li>5. Meningkatkan kualitas mutu pendidik dan pendidikan.</li><li>6. Meningkatkan kemitraan yang baik antara sekolah, orang tua dan lembaga-lembaga yang konsen dalam pengembangan pendidikan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan pendidikan mudah, murah dan berkualitas</li><li>2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan</li><li>3. Peningkatan kompetensi guru</li><li>4. Penguatan kelembagaan terkait pendidikan</li><li>5. Pemberian dukungan terhadap proses penyelenggaraan pendidikan pada pesantren</li><li>6. Pemberian beasiswa dan penghargaan bagi pemuda berprestasi.</li><li>7. Pemberian bantuan penyelesaian studi bagi warga kurang mampu</li></ol>



		7. Memberikan beasiswa bagi siswa/generasi muda berprestasi baik dibidang olahraga, iptek dan kesenian	
--	--	--	--

<b>Isu strategis 2 . Kebijakan Pengembangan Bidang Kesehatan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman dan bertaqwa	Pelayanan kesehatan terintegrasi dan berkualitas, masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta keluarga berencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengupdate data kependudukan untuk memastikan seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan diseluruh pusat-pusat layanan kesehatan.</li> <li>3. Menyediakan dokter dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan di rumah sakit dan puskesmas.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.</li> <li>5. Meningkatkan sosialisasi pentingnya kesehatan dan pola hidup keluarga berencana.</li> <li>6. Memberikan reward bagi puskesmas, kecamatan dan desa yang mampu mewujudkan 0 kasus AKI, AKB dan gizi kurang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan gratis dan dekatkan pelayanan pada masyarakat.</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan para medis.</li> <li>4. Peningkatan promosi kesehatan.</li> <li>5. Pemberian reward kesehatan.</li> <li>6. Peningkatan sosialisasi kepada pasangan usia subur dan jumlah peserta KB Aktif</li> </ol>

**Isu starategis 3 . Kebijakan Pengembangan Bidang Ekonomi**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Mengembangkan ekonomi kerakayatan berbasis agrobisnis dan agroindustri</p>	<p>Para petani, peternak, nelayan mudah, mampu dan berhasil mengelola usahanya, meningkat produksinya serta tersedia sistem pemasaran yang baik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyempurnakan database rumah tangga petani, peternak dan nelayan.</li> <li>2. Meningkatkan SDM petani, nelayan dan peternak.</li> <li>3. Meningkatkan peran lembaga ekonomi mikro dan BUMDes dalam proses pemasaran.</li> <li>4. Mengurangi pengeluaran rumah tangga petani, peternak dan nelayan berpenghasilan rendah.</li> <li>5. Meningkatkan bantuan sarana produksi pertanian yang didistribusi sesuai iklim dan musim tanam serta alat mesin pertanian dan jaringan irigasi desa.</li> <li>6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan perikanan serta bantuan peralatan produksi perikanan dan juga pengawasan.</li> <li>7. Meningkatkan bantuan ternak sapi, kambing dan unggas serta sempurnakan kualitas manajemen bantuan dan pengawasan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penigkatan bantuan modal usaha bagi KUKM dan koperasi.</li> <li>2. Pemberian bantuan modal bagi kelompok-kelompok industri dan kerajinan yang berbasis SDA lokal.</li> <li>3. Peningkatan SDM pengelola koperasi, BUMDes dan lembaga ekonomi mikro lainnya.</li> <li>4. Pemberian bantuan keuangan kepada BUMDes dan koperasi dan lembaga ekonomi mikro yang sehat dan aktif.</li> <li>5. Pembangunan galeri UMKM di kawasan pohon cinta.</li> <li>6. Peningkatan sumber daya manusia UMKM.</li> <li>7. Peningkatan promosi dan fasilitasi kemudahan izin usaha.</li> <li>8. Peningkatan kapasitas bagi yang menganggur melalui pelatihan kewirausahaan.</li> <li>9. Pemberian bantuan modal usaha bagi usia produktif penganggur yang berminat kembangkan wirausaha.</li> <li>10. Penyediaan akses informasi terkait ketenaga kerjaan.</li> <li>11. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja dengan memprioritaskan tenaga lokal jika sesuai kompetensi.</li> </ol>



		8. Meningkatkan bantuan permodalan bagi usaha kecil dan perbaiki manajemen usahanya. 9. Memberikan bantuan modal kepada kelompok usaha yang mengembangkan industri atau kerajinan yang berbasis komoditi lokal. 10. Memberikan bimtek, pelatihan dan magang bagi kelompok usaha kecil, koperasi dan lembaga ekonomi lainnya. 11. Memberikan bantuan ke BUMDes dan tingkatkan kapasitas personilnya dalam manajemen keuangan. 12. Menyediakan galeri UKM khas Pohuwato dalam kawasan yang strategis	
--	--	--	--

<b>Isu strategis 4 . Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, masyarakat harmonis dan agamis dengan mengedepankan gender	.	1. Meningkatkan sumber daya ASN. 2. Menyempurnakan manajemen kepegawaian berdasarkan kompetensi dan karir yang jelas dan terukur.	1. Peningkatan dan pengembangan SDM ASN melalui diklat formal maupun non formal serta jenjang pendidikan. 2. Pengembangan sistem informasi manajemen pemerintahan melalui Teknologi Informasi

		<p>3. Menyempurnakan proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban dengan baik dan tepat waktu.</p> <p>4. Menyempurnakan dan selalu update database pembangunan sesuai tupoksi masing-masing SKPD.</p> <p>5. Meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam membangun daerah.</p> <p>6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa beserta kelembagaannya.</p> <p>7. Memberikan peluang yang sebesar besarkan bagi perempuan untuk meningkatkan karier baik di birokrasi maupun parlemen</p>	<p>3. Peningkatan kualitas sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban.</p> <p>4. Peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan dimasing-masing SKPD</p> <p>5. Peningkatan peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah</p> <p>12. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa beserta kelembagaannya dalam pengelolaan dana desa</p>
--	--	---	---

### 3. RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 - 2025

FOKUS DAN RENCANA AKSI	OPD TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2024	2025	
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER</b> <b>I. Penguatan Kelembagaan PUG</b> <b>1. Penyusunan R PUG</b> <b>2. Reviu Pembentukan dan</b>	POKJA PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG  POKJA	  ✓  ✓					1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan



FOKUS DAN RENCANA AKSI	OPD TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2024	2025	
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>Penetapan Focal Point PUG di seluruh SKPD</b>	PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG Seluruh SKPD	✓					Perempuan 4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
<b>3. Pembentukan Tim Teknis POKJA PUG</b>	POKJA PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG	✓					
<b>4. Pelaksanaan RAKOREV Pokja PUG, Tim Teknis POKJA PUG dan Focal Point PUG</b>	POKJA PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG	✓					
<b>5. Optimalisasi Sekretariat POKJA PUG</b>	BP3AKB POKJA	✓					
<b>6. Sosialisasi PUG, advokasi, pelatihan dan seminar untuk seluruh jajaran pemerintah Kabupaten</b>	PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG POKJA	✓					
<b>7. Penyusunan Rancangan Perda/Perbup tentang Implementasi PUG</b>	PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG Bagian Hukum	✓					
<b>II. Peningkatan Kebijakan Publik Responsif Gender</b>		✓					
<b>1. Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG</b>	POKJA PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG	✓					1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
<b>2. Penyusunan indikator kinerja pencapaian PUG.</b>	POKJA PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG		✓				
<b>3. Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender</b>	PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG		✓				

FOKUS DAN RENCANA AKSI	OPD TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2024	2025	
1	3	4	5	6	7	8	9
4. Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender	POKJA PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG		✓				
5. penerapan anggaran responsif gender di beberapa SKPD	BAPERLITBANG DP3AP2KB						
6. Diseminasi panduan teknis pelaksanaan PUG	POKJA PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG		✓				
7. Diseminasi indikator kinerja pencapaian PUG	POKJA PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG		✓				
8. Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender	POKJA PUG,BPP- POKJA PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG	✓					
9. Diseminasi RAD PUG			✓				
10. Diseminasi PERDA/PERBUP tentang implemantasi PUG	POKJA PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG POKJA PUG,DP3AP2KB, BAPERLITBANG		✓				
III. Peningkatan Sistem Data dan Informasi Gender							
1. Penyusunan pedoman							



FOKUS DAN RENCANA AKSI	OPD TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2024	2025	
1	3	4	5	6	7	8	9
<p>pengumpulan data pilah gender</p> <p>2. Bimbingan teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencana SKPD</p> <p>3. Penyusunan profil gender tingkat Kabupaten</p> <p>4. Pembuatan website POKJA PUG</p> <p>5. Pembuatan aplikasi profil gender</p>	<p>POKJA PUG, DP3AP2KB, BAPERLITBANG , BPS, Seluruh SKPD DP3AP2KB,  DP3AP2KB,  DP3AP2KB,</p>						

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID PUG	KEPALA DP3AP2KB	KABAG LITKUM	ASISTEN POKESRA	ASISTEN	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>